

## **KATA PENGANTAR**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar telah melaksanakan tahapan lima tahun pertama Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) pembangunan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana periode Tahun 2016 – 2021. Tahap pertama pembangunan berjangka menengah tersebut merupakan bagian dari Pembangunan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar Tahun 2005 – 2025.

Mengawali Tahap ketiga Pembangunan Jangka Menengah ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021, yang disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, khususnya pembangunan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana. Pada tahap ini, telah dapat dibangun beberapa komponen dasar sistem manajemen Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana, serta beberapa kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana untuk menciptakan kondisi sistem manajemen Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana dalam rangka terciptanya Situasi dan Kondisi yang tertib, aman, tentram yang berwawasan kebangsaan. Namun demikian sampai dengan akhir periode pembangunan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana tahap pertama, masih dijumpai adanya kelemahan beberapa sub sistem manajemen Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana yang belum dapat disempurnakan atau dikembangkan.

Menyadari masih adanya beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada dalam sistem manajemen Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana, maka diperlukan langkah upaya secara sistemik dan berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Oleh karena itu agar langkah sebagaimana dimaksud dapat menjadi skala prioritas program lima tahun pembangunan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana ke depan, maka Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 lebih mempertajam berbagai program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana sebagaimana prioritas pembangunan Daerah bidang Integrasi Bangsa dan Politik serta Penanggulangan Bencana.

Dengan memperhatikan tercapainya keselarasan pada format dan sistematika penyusunan Rencana Strategis Daerah, maka Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021, disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk selanjutnya Visi dan Misi, serta Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 ini menjadi orientasi dan pedoman bagi seluruh Bidang dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Demikian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dalam berupaya mewujudkan visinya.

Blitar,

2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik  
Dan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Blitar



**DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I    Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	4
1.3    Maksud dan Tujuan .....	7
1.4    Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    Gambaran Pelayanan Bakesbang, Pol dan PBD</b>	
<b>Kota Blitar</b> .....	<b>10</b>
2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bakesbang, Pol dan PBD .....	10
2.2    Sumber Daya Bakesbang, Pol dan PBD .....	18
2.3    Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Bakesbang, Pol dan PBD .....	23
2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakesbang, Pol dan PBD .....	24
<b>BAB III   Permasalahan dan Isu – isu Strategis Berdasar</b>	
<b>Tugas dan Fungsi</b> .....	<b>29</b>
3.1    Identifikasi Permasalahan berdasarkan Pokok dan Fungsi Pelayanan .....	29
3.2    Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	30
3.3    Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra .....	31
3.4    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah - Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar .....	32
3.5    Penetapan Isu – isu Strategis .....	34

<b>BAB IV</b>	<b>Tujuan dan Sasaran Bakesbang, Pol dan PBD .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB V</b>	<b>Strategi dan Arah Kebijakan Bakesbang, Pol dan PBD .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VI</b>	<b>Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VII</b>	<b>Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>	<b>85</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>90</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memroyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar (Osborne dan Gaebler). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menetapkan dan mencapai tujuannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah yang melibatkan kegiatan penetapan indikator kinerja dan penetapan targetnya dan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diikuti dengan Peraturan Daerah Kota Blitar nomer 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar, berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk

disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kota Blitar melakukan penyederhanaan kegiatan, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021.

Dengan Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

- a. Hasil Evaluasi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menyatakan perlu adanya penyesuaian berupa perubahan Rencana Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021
- b. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

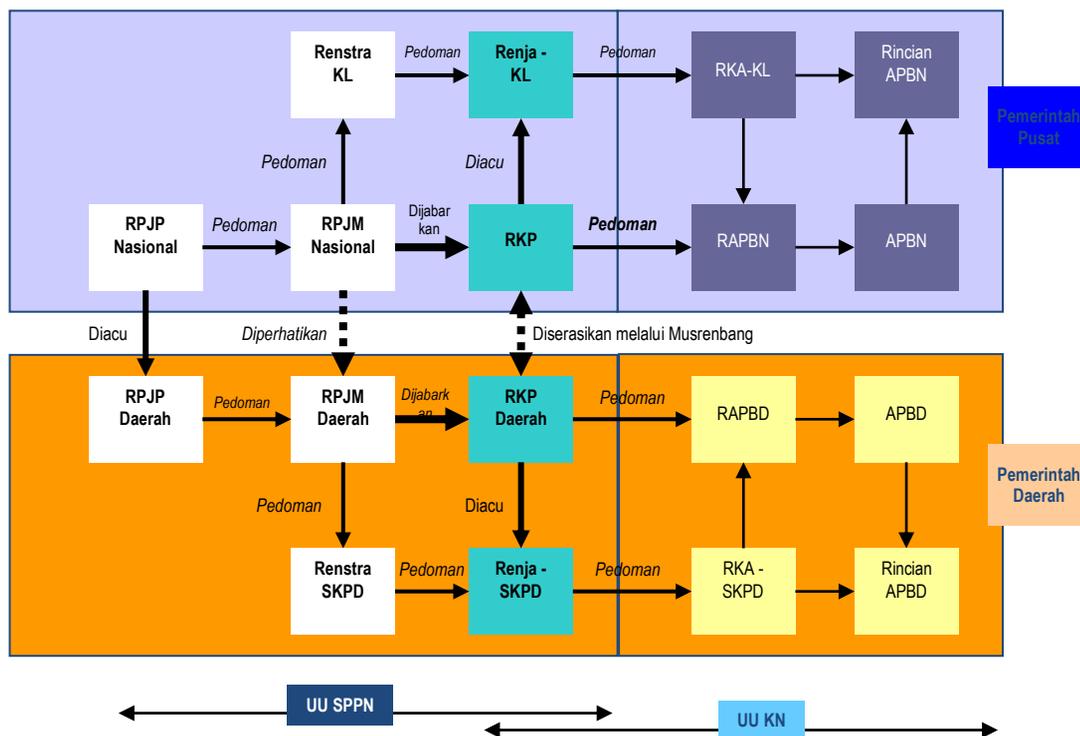
Dengan adanya penyederhanaan kegiatan, maka secara otomatis Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar juga mengacu

pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kota Blitar, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sebagai induk dari lembaga Kesbangpol.

Sesuai pasal 13 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan / atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Bakesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang –undang NO. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003,

- Nomor 47 ( Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 )
- b. Undang – undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )
  - c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - d. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 )
  - e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - f. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 )
  - g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2015 -2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 )
  - h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .
  - 1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - k. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
- q. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031.
- r. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030.
- s. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025.
- t. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- u. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021.
- v. Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Blitar No 4 Tahun 2016 )
- w. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat Daerah untuk 5 ( lima ) Tahun ke depan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan program dan kegiatan strategi yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Blitar dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan Daerah untuk 5 ( lima ) Tahun ke depan, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan maksud :

- Untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar selama 5 ( lima ) Tahun Terakhir pada periode pembangunan yang lalu.

Adapun Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) antara lain :

- Mengidentifikasi kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan penanggulangan Bencana Selama 5 (lima) Tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu
- Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Bakesbangpol dan PBD selama 5 ( lima ) Tahun mendatang
- Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 kedalam tujuan , sasara, strategis dan arah kebijakan
- Menetapkan rencana program dan kegiatan Bakesbangpol dan PBD yang disertai pendanaan indikatif selama 5 ( lima ) Tahun mendatang
- Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bakesbangpol dan PBD . selama 5 ( lima ) Tahun mendatang
- Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah dan RKA SKPD dan
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran , pelaksanaan , pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 ( lima ) Tahun

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II Gambaran Pelayanan Bakesbang, Pol dan PBD**

###### **Kota Blitar**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III Permasalahan Dan Isu – isu Strategis**

**Perangkat Daerah**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Pokok dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah - Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar
- 3.5 Penetapan Isu – isu Strategis

**BAB IV Tujuan dan Sasaran**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.1.1 Tujuan
- 4.1.2 Sasaran
- 4.2 Strategi dan Kebijakan PD
- 4.2.1 Strategi

**BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

**BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

**Tabel. 6.1.1 ; 6.1.2 ; 6.1.3 ; 6.1.4**

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

**Tabel. 7.1.1 ; 7.1.2 ; 7.1.3**

**BAB VIII Penutup**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar Juncto Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana daerah Kota Blitar, merupakan unsur pendukung Walikota Blitar yang mempunyai tugas : *Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana Daerah.*

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana berdasar Peraturan Perundang – Undangan.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada bidang Kesatuan Bangsa, politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana.
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana.
- d. Penyelenggaraan tugas Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, serta bina Penanggulangan Bencana.
- e. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, serta bina Penanggulangan Bencana.

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, serta bina Penanggulangan Bencana.
- g. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan.
- h. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan.
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kesatuan Bangsa;
4. Bidang Hubungan Antar Lembaga
5. Bidang Ketahanan Daerah
6. Bidang Penanggulangan Bencana

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris sedangkan masing masing dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawan langsung kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar (Bagan Struktur Organisasi terlampir)

Uraian tugas dari masing masing struktur adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dilingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian, tugas pada bidang – bidang, penelolan

administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis kepala badan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan kepala badan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja badan dari masing masing bidang secara terpadu.
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dilingkungan Badan
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan sekretariat.
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Rencana Kerja ( Renja )
- f. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA )
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA ) dan Pelaksanaan Dokumen Anggaran ( DPPA )
- h. Fasilitasi penyusunan penetapan kinerja ( PK )
- i. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi Badan
- j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas tugas keprotokolan dan kehumasan
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor penyelenggaraan rapat dinas.
- m. Fasilitasi pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

- n. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tupoksi.
- o. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
- p. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya
- q. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban ( SPJ ) keuangan
- r. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- s. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) masing masing bidang dan Standar Pelayanan Publik ( SPP )
- t. Fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian inten pemerintah (SPIP )
- u. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat ( IKM ) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
- v. Fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( SAKIP ), laporan keterangan pertanggung jawaban walikota ( LKJIP ) dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah ( LPPD )
- w. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat
- x. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana.
- y. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan
- z. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi
- aa. Pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan

2. Bidang Kesatuan Bangsa
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan pendukung dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta pengegakan Hak Azasi Manusia;
  - d. Penyusunan instrumen operasional tugas kesatuan bangsa serta bina ideologi dan politik dalam negeri;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas kesatuan bangsa serta bina ideologi dan politik dalam negeri;
  - f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas kesatuan bangsa serta bina ideologi dan politik dalam negeri;
  - g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
  
3. Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan ketahanan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan pendukung di bidang peningkatan ketahanan daerah;

- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, purnataman, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
  - d. Pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama di bidang intelkam;
  - e. Fasilitasi kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan penyakit masyarakat, penanganan konflik pemerintahan serta konflik sosial di daerah;
  - f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam cegah dini potensi konflik dan keamanan daerah;
  - g. Penyusunan instrumen operasional tugas bidang peningkatan ketahanan daerah;
  - h. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas peningkatan ketahanan daerah;
  - i. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang peningkatan ketahanan daerah;
  - j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang peningkatan ketahanan daerah;
  - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan hubungan antar lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;
  - b. Penyusunan program dan / atau kegiatan pendukung di bidang hubungan antar lembaga;
  - c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang peningkatan hubungan antar lembaga / organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga

- swadaya masyarakat, kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum;
- d. Pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama dibidang hubungan antar lembaga / organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum;
  - e. Fasilitasi kegiatan bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga penyelenggaraan pemilu;
  - f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum;
  - g. Penyusunan instrumen operasional tugas bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum;
  - h. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi bidang Peningkatan hubungan antar lembaga;
  - i. Pembinaan dan Pengendalian tugas di bidang peningkatan hubungan antar lembaga;
  - j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang peningkatan hubungan antar lembaga;
  - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Penanggulangan Bencana
  - a. Penyusunan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang Penanggulangan Bencana;
  - c. Penyusunan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sarana prasarana Penanggulangan Bencana;
  - e. Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan provinsi, dan/atau kota lain;
  - f. Penyusunan prosedur tetap penanganan bencana;
  - g. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - h. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - i. Melaksanakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - j. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - k. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
  - l. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman dan bahaya bencana;
  - m. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
  - n. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bina penanggulangan bencana;

- o. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang bina penanggulangan bencana;
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sesuai dengan struktur organisasi diatas, komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan :**

- S3 berjumlah : - Orang
- S2 berjumlah : 5 orang
- S1 berjumlah : 9 orang
- D3 berjumlah : 1 orang
- SLTA : 10 orang
- berjumlah
- SD berjumlah : - orang

#### **b. Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :**

- Pembina Utama : 1 orang  
Muda (IV/c)
- Pembina Tk. I : 2 orang  
(IV/b)
- Pembina (IV/a) : 4 orang
- Penata Tk. I : 10 orang  
(III/d)
- Penata (III/c) : - orang
- Penata Muda Tk. I : 1 orang  
(III/b)
- Penata Muda : 1 orang  
(III/a)
- Pengatur Tk. I : 1 Orang

- (II/d)
  - Pengatur (II/c) : 5 orang
  - Pengatur Muda : - orang
  - Tk. I (II/b)
  - Pengatur Muda : - orang
  - (II/a)
  - Juru Tk. I (I/d) : - Orang
  - Juru (I/c) : - Orang
  - Juru Muda Tk. I : - Orang
  - (I/b)
  - Juru Muda (I/a) : - Orang
- c. Jabatan Struktural dan Fungsional yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar terdiri dari :
- Eselon II/a : - Orang
  - Eselon II/b : 1 orang
  - Eselon III/a : 4 orang
  - Eselon III/b : 1 orang
  - Eselon IV/a : 10 orang
- d. Berdasarkan jenis kelamin :
- Laki-laki : 18 orang
  - Perempuan : 7 orang
- e. Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional :
- Diklat Pim IV : 10 orang
  - Diklat Pim III : 6 orang
  - Diklat Pim II : 1 orang
  - Diklat Fungsional : - Orang

## 2. Aset

Selain sumber daya manusia, Badan Kesatuan Bangsa politik dan penanggulangan bencana Kota Blitar telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana kerja yang mengarah pada pencapaian sistem kinerja yang baik. adapun

jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini dapat diinformasikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. 2.3

Data Aset Bakesbangpol dan pBD Kota Blitar

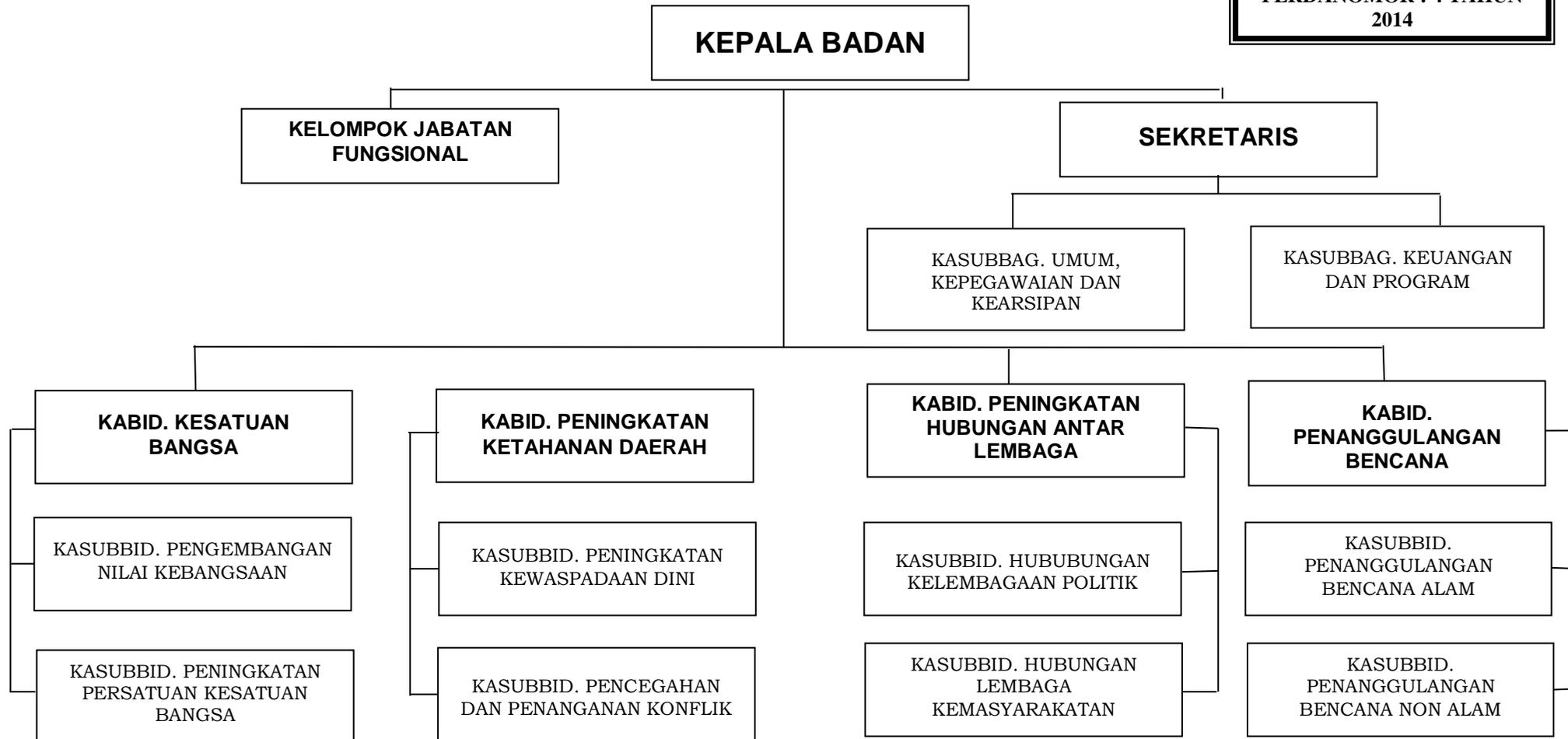
<b>NO.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
1.	Printer	21 Buah	3 rusak 18 baik
2.	Kendaraan Roda 4	4 Buah	Baik
3.	Sepeda Motor	7 Buah	6 baik 1 rusak
4.	Komputer	7 Buah	Baik
5	Laptop	9 Buah	9 baik
6	Genset	3 Buah	1 baik 2 rusak
7	Meja Kursi Tamu	5 stel	Baik
8.	Filing Kabinet	7 Buah	Baik
9.	Kursi	70 Buah	30 rusak 40 baik
10	Brankas	1 Buah	Baik
11	Almari	13 Buah	Baik
12	Meja Tulis / Kerja	22 Buah	Baik
13	Kursi Kerja	22 Buah	Baik
	Kursi rapat dan pimpinan rapat	33	Baik
14	AC	8 Buah	1 rusak 7 baik
15	Kulkas	1 Buah	Baik
16	Televisi	3 Buah	Baik
17	LCD	1 Buah	Baik
18	Handycome	1 Buah	Rusak
19	Meja Rapat	24 Buah	Baik
20	Tenda Pleton	2 Unit	Baik tali hilang
21	Lampu Sorot	1 Buah	Baik
22	Perahu karet	2 buah	baik

*Data Tahun 2018*

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. sedangkan untuk printer dan laptop perlu pengadaan lagi untuk penganti yang rusak.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

LAMPIRAN II  
PERDANOMOR : 4 TAHUN  
2014



**2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar**

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep meliputi: layanan rekomendasi penelitian/survey dan praktek kerja lapangan (PKL) dan Layanan penerbitan surat keterangan terdaftar untuk lembaga/ormas. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut

Layanan rekomendasi penelitian/survey dan Praktek Kerja Lapangan. Layanan rekomendasi penelitian/survey dan praktek kerja lapangan (PKL) yang merupakan salah satu bagian layanan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep telah diuraikan sebagaimana pada table berikut ini :

Tabel 2.3.1

Jumlah Rekomendasi Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan

No	Uraian	TAHUN	
		2017	2018
1.	Rekomendasi penelitian/survey dan Praktek Kerja Lapangan	205	277

*Data Tahun 2018*

Tabel. 2.3.2

Layanan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Untuk LSM/Ormas

No.	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1.	SKT Ormas/LS	148	160
2	Data Partai Politik		

*Data Tahun 2018*

Tabel 2.3.3

Layanan Penanganan Kebencanaan

No	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1.	Layanan Bencana Alam	-	4

*Data Tahun 2018*

**2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar dalam 5 ( lima ) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Sumenep antaralain :

**Tantangan**

- a. Melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Mudah nya menerima budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia;
- c. Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan dan perbedaan status ekonomi;
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Bela Negara;
- e. Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan
- f. Masih rendahnya partisipasi politik, budaya dan etika politik dan kurangnya pemahaman tentang aturan perundangan yang berlaku;
- g. Adanya isu SARA yang berpotensi konflik;
- h. Kurangnya pemberdayaan umat beragama dalam bentuk kerukunan antar umat beragama maupun hubungan umat beragama dengan pemerintah;
- i. Kurangnya pemajuan dan penghormatan HAM;
- j. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap keputusan 2 ( dua ) Menteri tentang Peraturan Bersama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang

pedoman pelaksanaan Tugas kepala Daerah / wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah.

*REVIEW RENSTRA 2016-2021*

**TABEL 2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANG, POLITIK DAN PBD KOTA BLITAR**  
**KOTA BLITAR TAHUN 2011 - 2015**

No.	Indikator	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Keseluruhan	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kejadian SARA yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Konflik Sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
5	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	
6	Jumlah Penduduk	147.263	148.735	150.222					146.107	
7	Kelurahan Tangguh Bencana	14%	25%	35%	45%	14%		35%	45%	
8	Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik yang Terdaftar	36%	40%	42%	60%	36%				
9	Jumlah TPS	311	-	311	311	311	-	311	311	
10	Pelaksanaan Pemilu	1 kali	-	1 kali	2 kali	1 kali	-	1 kali	2 kali	
11	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	80%	0%	80%	80%	80%	0%	80%	80%	

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbang, Pol dan PBD**  
**Kota Blitar Tahun 2011 – 2015**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah penanganan konflik bernuansa SARA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Jumlah Kegiatan dialog dan keagamaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lintas agama dan keyakinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah Lembaga Organisasi Masyarakat	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
4.	Jumlah Partisipasi pemilih dalam pilpres	1005	100 5	100 5	1005	1005	1005	100 5	1005	1005	100 5	1005	1005	1005	1005	1005
5	Jumlah pemilih dalam pemilu kada	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
6	Persentase keaktifan koordinasi dengan muspida	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
7	Jumlah organisasi / siaga abencana yang memiliki SDM terlatih dan standar penanggulangan bencana	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
8	Jumlah perwakilan perempuan dalam lembaga legislative	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%

# REVISI RENSTRA 2016-2021

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bikesbang, Pol dan PBD**  
**Kota Blitar Tahun 2011 - 2015**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung			1.853.400.750	842.044.425	3.029.269.606		1.853.400.750	842.044.425	3.029.269.606	1.853.400.750							
Belanja Tidak Langsung			2.805.522.358	87.002.017	2.004.971.590		2.805.522.358	87.002.017	2.004.971.590	2.805.522.358							

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.**

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

- a. Kesenjangan sosial politik, sosial ekonomi dan budaya
- b. Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang SARA yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu Premodialisme.
- c. Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat.
- d. Hasil proses politik (Pemilihan Kepala Daerah) masih sering dikomplain oleh kandidat lain.
- e. Masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait pendirian rumah ibadah.
- f. Masih banyak aliran kepercayaan yang menimbulkan keresahan di masyarakat seperti Ahmadiyah, faham aliansi, saksi yehawa, aliran ilmu, Tarekat Itihad, Tarekat Yusrim, Negara Islam Indonesia dan lain-lain.

- g. Organisasi kemasyarakatan lembaga swadaya masyarakat belum berperan secara maksimal.
- h. Peran tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan dan tokoh masyarakat belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.
- i. Belum pahamiannya tentang Wawasan Kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan.
- j. Masih rentannya masyarakat terhadap isu-isu yang berpotensi konflik.
- k. Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalan unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis.
- l. Masih maraknya aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme.
- m. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing sering memanfaatkan LSM lokal dalam pencapaian misinya.
- n. Konflik wilayah perbatasan dan pertikaian antar warga, antar pemuda dan antar desa.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan Misi Walikota Blitar periode tahun 2016 – 2021 adalah :

Visi :

“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021”

Misi :

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam hal ini terkait dengan tujuan Misi ke 1 (satu) adalah : “Meningkatkan aktualisasi Nilai – nilai Religius dalam kehidupan bermasyarakat” dengan fokus program ke 1 dan 2, dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 2. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dan terkait dengan tujuan Misi ke 5 (lima) adalah :  
“Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso”, dengan fokus Program ke 1, 5, 6, 8, 9 dan 13, dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Kenyamanan;
3. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
4. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
5. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
6. Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi;

### **3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra**

Telaahan terhadap Renstra dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kementrian umum Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana dengan Renstra kementrian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing masing.

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar ditinjau dari sasaran jangka menengah Perencanaan Strategis Kementerian / Lembaga, dalam hal ini Dirjen Kesbang Politik Kemendagri, serta sasaran jangka menengah Kesbang Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

Sebagaimana Visi Direktorat Jendral (Ditjen) Kesbang dan Politik Kemendagri adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan Misi Ditjen Kesbang dan Politik sebagai berikut :

1. Memelihara dan memanfaatkan keutuhan Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia.

2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Memantapkan Wawasan Kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan Nasional, Pembauran Kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya, dan hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan, yaitu memperkuat kesatuan dan persatuan Nasional serta stabilitas Politik Dalam Negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, lebih lanjut Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan kualitas proses demokrasi
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar.**

Pada bagian ini akan dikemukakan faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari Tujuan,

Kebijakan dan Strategi yang tercantum pada Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 dan dalam KLHS tujuan adalah

mewujudkan Kota Blitar sebagai Kota Wisata Kebangsaan yang di dukung oleh sektor pertanian, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Tujuan yang tercantum dalam Perda Kota Blitar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 berbunyi : “Mewujudkan Kota Blitar sebagai Kota Wisata Kebangsaan yang di dukung oleh sektor pertanian, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan” yang sudah terdapat konsistensi substansi tujuan dan sasaran RPJMD dengan RTRW yang intinya untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan. Namun beberapa tujuan yang termuat dalam RPJMD belum diakomodir oleh RTRW yang terkait dengan peningkatan pelayanan pelayanan Sarana Pendidikan dan Kesehatan.

Sedangkan Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 sebagai berikut :

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota meliputi :
  - a. Pengembangan Wisata Kebangsaan dan Wisata lainnya ;
  - b. Pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional Kota ;
  - c. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang merupakan hubungan antar kawasan ;
  - d. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan ;
  - e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman ;
  - f. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung ;
  - g. Pengembangan Kegiatan Pertanian Perkotaan ;
  - h. Peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota ;
  - i. Pelestarian kawasan Cagar Budaya ;
  - j. Pengembangan Kawasan Budi Daya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang; dan
  - k. Penetapan kawasan – kawasan strategis Kota.

2. Strategi Pengembangan Kota Wisata Kebangsaan dan Wisata lainnya meliputi:
  - a. Meningkatkan dan mengembangkan objek Wisata Kebangsaan dan objek wisata lainnya ;
  - b. Mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata ;
  - c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan pariwisata ;
  - d. Meningkatkan pemasaran wisata; dan
  - e. Meningkatkan kerjasama pariwisata lintas wilayah.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

#### a. Gambaran pelayanan PD

Sebagai wujud dari pelaksanaan pelaporan Bakesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, dengan perhatikan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, yaitu :

1. Masih rentanya masyarakat terhadap isu – isu yang berpotensi konflik
2. Organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Kota Blitar belum berperan secara maksimal
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana.

#### b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian dan lembaga terkait

Sasaran strategis pada Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kesbang Politik Kementerian Dalam Negeri RI merupakan sasaran jangka menengah Kementerian dalam Negeri dan akan dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat
  4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD Provinsi
- Memperhatikan ringkasan Renstra Ditjen Kesatuan bangsa dan Politik tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik Jawa Timur 2014 – 2019 berkaitan dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Provinsi Jawa Timur.
- d. Kerangka tujuan
- e. Implikasi RT RW bagi pelayanan OPD
- f. Implikasi KLHS pelayanan OPD

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK dan  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan , maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD . Gambaran mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar Tahun 2016-2017**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Tujuan</b>						
1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Jumlah Kasus SARA	Jumlah kasus SARA	0	0	0	0
	<b>Sasaran</b>						
	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Prosentase kejadian SARA yang tertangani	Jumlah kejadianSARA yang tertangani/ jumlah kejadian SARA x 100%	100 %	100 %	100%	100%
2	<b>Tujuan</b>						
	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman tentram dan nyaman	Persentase korban bencana direhabilitasi	Jumlah korban bencana direhabilitasi/jumlah korban bencana x 100%	15	35	.....	.....
		Indeks Demokrasi	Rata-rata tertimbang aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi	73,6	73,6	.....	.....
	<b>Sasaran</b>						
	Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang aman , tentram dan nyaman	Persentase konflik sosial yang tertangani	Jumlah Konflik sosial yang tertangani / jumlah konflik sosial x 100%	100 %	100 %	100%	100%
		Persentase kelurahan tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh bencana / jumlah kelurahan x 100%	14 %	25 %	14 %	23,8 %
		Persentase ormas dan orpol yang etrdaftar	Jumlah Orkemas yang terdaftar / jumlah orkemas X 100 %	70%	72%	34,78 %	72,19%

Tabel 4.2  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar  
 Tahun 2018 - 2021

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Tujuan</b>						
1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Persentase penanganan potensi Kasus SARA	Jumlah kejadian SARA tertangani / jumlah kejadian SARA x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	<b>Sasaran</b>						
	Meningkatkan Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Prosentase kejadian SARA yang tertangani	Jumlah kejadian SARA yang tertangani/ jumlah kejadian SARA x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %
2	<b>Tujuan</b>						
	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman tentram dan nyaman	Indeks Demokrasi	Rumus Indeks	73,6	73,6	73,6	73,6
	<b>Sasaran</b>						
	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase konflik sosial yang tertangani	Jumlah Konflik sosial yang tertangani / jumlah konflik sosial x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh bencana / jumlah kelurahan x 100%	35%	45%	60%	80%
	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partai politik	Persentase ormas dan orpol yang terdaftar	Jumlah Orkemas yang terdaftar / jumlah orkemas X 100 %	74%	76%	78%	80%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK dan PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Untuk mencapai salah satu sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 ini menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

#### **Analisa SWOT**

Kekuatan (Strenghts) :

1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 juncto Peraturan Walikota Blitar Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
2. Penyediaan Anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
3. Adanya akses yang baik kepada infra struktur politik dan supra struktur politik;
4. Adanya koordinasi yang baik di jajaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
5. Tersedianya Sumber Daya Manusia;
6. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.

Kelemahan (Weaknesses) :

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana Teknologi Informasi yang tersedia;
3. Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar kurang di kenal Masyarakat;
4. Job Discription yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali over laping (tumpang tindih) dengan Badan/Dinas/Kantor lain.

Peluang (Opportunities)

1. Masih adanya kebutuhan Masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur Politik dan Supra Struktur Politik, Wawasan Kebangsaan, Ketertiban/Ketentraman, Demokrasi dan HAM;
2. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi;

Ancaman (Treaths) :

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD;
2. Keraguan Masyarakat terhadap netralitas seorang PNS;
3. Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat (Vertikal, Horisontal dan SARA).

Berdasarkan analisa SWOT seperti tersebut diatas telah jelas, maka alternatif Strategi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dapat dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Memanfaatkan loyalitas aparaturnya untuk menjalin kerja sama dengan instansi terkait baik di daerah maupun di pusat serta kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda;
2. Meningkatkan tatanan kehidupan Masyarakat yang aman dan kondusif;

3. Memanfaatkan kualitas dan keahlian aparatur sesuai disiplin ilmu dan tupoksi masing – masing;
4. Meningkatkan ketersediaan data yang akurat;
5. Meningkatkan kompetensi aparatur;
6. Meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerja;
7. Mengoptimalkan koordinasi dengan SKPD lain dan Pemerintah Pusat;
8. Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum serta bencana.

**MATRIKS ANALISA SWOT**

Kesimpulan Analisa Faktor Intern (KAFI)		No.	Kekuatan (S)	No.	Kelemahan (W)
			1.	Perda Nomor 4 Tahun 2013 jo Perwali Kota Blitar Nomor 39 Tahun 2014	1.
		2.	Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesbang, Politik dan PBD Kota Blitar	2.	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
		3.	Adanya akses yang baik kepada infra struktur dan supra struktur Politik	3.	Peran Bakesbang, Pol dan PBD secara mendasar belum menyentuh Masyarakat
		4.	Adanya koordinasi yang baik di jajaran Bakesbang, Pol dan PBD Kota Blitar dengan Badan / Dinas / Kantor / Bagian terkait.	4.	Sehingga Bakesbang, Pol dan PBD Kota Blitar kurang di kenal Masyarakat
		5.	Tersedianya Sumber Daya Manusia	5.	Job Discirption yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan / Dinas / Kantor maupun Bagian
	Kesimpulan Analisa Faktor Ekstern (KAFFE)	6.	Adanya bentuk jejaring sebagai wadah / koordinasi lintas sektoral		
No.	Peluang (O)	No.	Pendorong (SO)	No.	Status (WO)
1.	Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, Demokrasi dan HAM	1.	Peningkatan peran dalam pemberdayaan infra dan supra struktur Politik, Wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM	1.	Peningkatan Sosialisasi eksistensi Bakesbang, Pol dan PBD Kota Blitar melalui terobosan – terobosan strategi dengan melibatkan partisipasi infra dan supra struktur Politik.
2.	Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan Demokrasi dan Penanggulangan Bencana	2.	Peningkatan kerja sama (fasilitasi) dengan Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi serta organisasi pengevaluasi bencana.	2.	Meningkatkan harmonisasi dan komunikasi sosial politik dengan elemen Masyarakat
				3.	Meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif di Kota Blitar
				4.	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM di Kota Blitar
No.	Ancaman (T)	No.	Status Quo (ST)	No.	Penghambat (WT)
1.	Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	1.	Melakukan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak	1.	Peningkatan kualitas SDM
2.	Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS	2.	Meningkatkan peran dan fungsi sebagai pelayanan public	2.	Meningkatkan kewaspadaan dini dengan menggunakan akses dan koordinasi yang baik dengan infra dan supra struktur Politik dan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam
		3.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam angka		

3.	Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat (Vertikal, Horisontal dan SARA)	pendidikan dan pembangunan di Bidang IPOLEKSOSBUD	
4.	Relatif tingginya potensi Bencana Alam dan non Alam	4. Melakukan koordinasi dengan infra dan supra struktur Politik untuk mengatasi potensi konflik 5. Melakukan koordinasi dengan infra dan supra struktur Politik untuk mengatasi potensi bencana alam dan non alam	

Tabel. 5.1

Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bakesbangpol dan PBD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menciptakan toleransi masyarakat kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman etika berbangsa dan bernegara.	Menumbuhkan semangat Nasionalisme dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.
2. Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang aman dan Tentram dan nyaman	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan kondisi tertib dan aman	Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa melalui gatra ideologi, politik ekonomi, sosial budaya , keamanan dan ketertiban .	Membangun hubungan politik konstruktif antara lembaga infra dan supra struktur politik, pemerintah dan masyarakat dalam berdemokrasi melalui fasilitasi

			penyelenggara n pendidikan politik secara intensif dan komprehensif.
--	--	--	--

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
**INDIKATIF**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsinya Badan kesatuan bangsa Politik dan penanggulangan bencana Daerah Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Sedangkan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. ( Tabel 6.1 )

## REVISI RENSTRA 2016-2021

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH 2016**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2016		2016			
										Target	Rp.	Kinerja	RP		
1	2	3	4				5	6	7	8	9		10	11	
Meningkatkan Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Prosentase penanganan potensi kasus SARA	4	33	xx	08	<b>Program pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	jumlah kasus kerusuhan bernuansa SARA	60%	60 %	283.011.550	60%	273.336.250	Bakesbang pol dan PBD	
						04	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya sosialisasi dan rapat koordinasi peningkatan kerukunan umat beragama (F= jumlah peserta sosialisasi dan rapat koordinasi)		71 org / 13 keg	119.322.200	71 org / 13 keg	119.252.100		
						03	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial	Terlaksananya sosialisasi pemahaman		150 org	66.438.600	150 org	63.873.600		

**REVENUE RENSTRA 2016 - 2021**

							dikalangan masyarakat	tentang HAM (F=Jumlah peserta sosialisasi yang hadir / jumlah peserta sosialisasi x 100%)						
						01	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi pembauran kebangsaan ( F = jumlah peserta sosialisasi yang hadir dibagi jumlah peserta sosialisasi) x 100%	100 org	97.250.750	100 org	90.200.550		
						02	Fasilitasi kelompok kerja pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK) dan sosialisasi wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya Kelompok kerja pusat pendidikan wawasan kebangsaan ( F = jumlah pokja yg terfasilitasi dibagi jumlah pokja )	150 org	60.350.000	-	-		
								Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan ( F = Jumlah peserta sosialisasi yang hadir dibagi jumlah peserta sosialisasi )	150 org	80.250.000	-	-		
							<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>			297.992.100		297.822.100		

## REKAPITULASI RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

					06	Seminar , Talkshow, Diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah pesertaseminar wawasan kebangsaan ( jumlah peserta seminar yang hadir dibagi jumlah peserta seminar )	400 org	66.680.600	400 org	66.680.600		
					05	PentaS Seni dan Budaya, festival lomba ciptadalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah peserta kegiatan anggota korp musik Kota Blitar( F = Jumlah kegiatan korsik terfasilitasi dibagi jumlah kegiatan korsik )	50 org	231.311.500	50 org	231.341.500		
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman tentram dan nyaman	Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang aman , tentram dan nyaman	jumlah masyarakat yang terkoordinasi dalam pencegahan dini terhadap gangguan ketertiban keamanan				<b>program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	persentase potensi konflik yang terdeteksi di tangani( F= jumlah konflik tertangani dibagi jumlah konflik yang ada X 100 %	100%	77.804.750		77.804.750		
					07	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Terlaksanannya pendidikan dan latihan kader Bela Negara ( F = Jumlah kader bela negara yang berhasil mengikuti diklat	150 org	77.804.750	150 org	77.804.750		



**REVISI RENSTRA 2016-2021**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Program peningkatan ,pemberantasan penyakit masyarakat ( pekat )	prosentase penanganan penyakit masyarakat		32.604.600		32.604.600		
				03	Penyuluhan, pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan Narkoba	Jumlah masyarakat yang memiliki kesadaran akan bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba	100%		150 org	32.604.600	100 org	32.604.600
Indeks demokrasi indonesia	meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Prosentase ormas / orpol yg mematuhi ketentuan perundang undangan	4	33	xx	Program Pendidikan Politik Masyarakat	persentase kinerja baik bagi ormas terdaftar	282.091.754		280.277.754		
					penyuluhan kepada masyarakat	jumlah peserta sosialisasi permendagri no 33 th 2012 tentang pendataan ormas			300 org	105.314.000	300 org	103.609.000
					koordinasi forum forum diskusi politik	jumlah peserta pertemuan antar partai politik			1050 org	176.777.754	1050 org	176.668.754



## REVENUE RENSTRA 2016 - 2021

						Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air, dan listrik	pembayaran rekening listrik, telp,internet, air	4 jenis	26.776.050	4 jenis	24.730.298		
--	--	--	--	--	--	--	---	---------	------------	---------	------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
				Penyediaan ATK	Pemenuhan kebutuhan ATK		32 jenis	26.430.900	32 jenis	26.430.900		
				Penyediaan Barang cetakan	ketersediaan barang cetakan		17 jenis	68.233.000	17 jenis	67.527.000		
				Penyediaan komponen instalasi listrik	pembelian alat listrik		6 jenis	15.174.000	6 jenis	15.169.400		
				penyediaan alat rumah tangga	ketersediaan alat alat RT		15 jenis	13.544.000	15 jenis	12.177.600		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang undangan	Tersediannya Bahan Bacaan		3 jenis	5.400.000	3 jenis	3.690.000		
				Penyediaan makan minum	Tersedianya makan minum tamu dan rapat		24 keg	26.844.000	24 keg	19.877.500		
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	tersediannya anggaran untuk koordinasi dan konsultasi		48 org	383.024.000	48 org	362.412.012		

## REVISI RENSTRA 2016-2021

						Pengadaan mebelair	pengadaan kebutuhan mebelair	-	-	-	-		
						pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan kantor	5 jenis	45.048.000	-	-		
						Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Tersediannya perlengkapan kantor	-	-				
						Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Tersedianya pengecatan gedung kantor	2500 m2	47.750.000	2500 m2	31.896.000		
						Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan operasional	Perawatan alat transportasi	4 jenis	117.800.000	4 jenis	101.019.650		
						Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perawatan peralatan kantor	3 jenis	5.900.000	3 jenis	5.900.000		
						Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya perlengkapan gedung	4 jenis	13.450.000	4 jenis	13.450.000		
						Pemeliharaan rutin / berkala Taman Kantor	Perbaikan Taman Kantor	3 jenis	6.068.000	3 jenis	5.068.800		

## REVENUE RENSTRA 2016 - 2021

						Pemeliharaan rutin / berkala mebelair	Terawatnya mebelair kantor		-	-	-	-		
						<b>Program Peningkatan Kapasitas SKPD</b>	<b>Tingkat partisipasi perangkat Daerah dalam agenda Kota( F = jumlah realisasi dibagi jumlah yang direncanakan di X 100 % )</b>		100%	66.240.000		64.890.000		
						Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar Nasional	Fasilitasi pelaksanaan even Daerah		6 jenis	66.640.000		64.890.000		
						<b>program peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan (F = Jumlah realisasi dibagi jumlah yang direncanakan X 100 % )</b>			13.044.000		13.044.000		
						Penyusunan perencanaan Kegiatan dan anggaran	Tersusnya Renstra, Renja, RKA, DPA, SKPD		-	-				

## REVISI RENSTRA 2016-2021

						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusnya Lakip, LPPD, LKPJ, SPP, IKM dan SOP		12 jenis	13.044.000	12 jenis	13.044.000		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------	------------	----------	------------	--	--



## REVISI RENCANA RENSTRA 2016-2021

TABEL 6.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2017		2017			
										Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	8	9	10	11
Meningkatkan Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Prosentase penanganan potensi kasus SARA	4	33	xx	08	<b>Program pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	jumlah kasus kerusuhan bernuansa SARA	60%	60%	607.303.750	95%	581.805.142	Bakesbang pol dan PBD	
						04	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya sosialisasi dan rapat koordinasi peningkatan kerukunan umat beragama (F= jumlah peserta sosialisasi dan rapat koordinasi)	100	70 org / 13 keg	136.375.500	70 org / 13 keg	124.795.500		
						03	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi pemahaman tentang HAM (F=Jumlah peserta sosialisasi yang hadir / jumlah peserta sosialisasi x 100%)	100	150 org	100.072.750	150 org	88.447.750		

## REVENUE RENSTRA 2016 - 2021

					01	Fasilitasi Forum Pambauran Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi pambauran kebangsaan ( F = jumlah peserta sosialisasi yang hadir dibagi jumlah peserta sosialisasi) x 100%	100	70 org	120.931.500	70 org	119.711.500		
1	2	3	4		5	6	7	8	9			10	11	
					02	Fasilitasi kelompok kerja pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK) dan sosialisasi wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya Kelompok kerja pusat pendidikan wawasan kebangsaan ( F = jumlah pokja yg terfasilitasi dibagi jumlah pokja )	-	70 org	249.924.000	70 org	248.850.392		
								150 org	80.250.000					
						<b>program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	Persentase penduduk mengikuti agenda peningkatan wasbang usia 15 s/d 49 th	60 %		458.755.882		442.919.282		
					06	Seminar , Talkshow, Diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah pesertaseminar wawasan kebangsaan ( jumlah peserta seminar yang hadir dibagi jumlah peserta seminar )	100	300 org	109.971.562	300 org	100.321.582		

## REVISI RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

						05	PentaS Seni dan Budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah peserta kegiatan anggota korp musik Kota Blitar( F = Jumlah kegiatan korsik terfasilitasi dibagi jumlah kegiatan korsik )	100	50 org	348.784.300	50 org	342.597.700		
--	--	--	--	--	--	----	---	--	-----	--------	-------------	--------	-------------	--	--

1	2	3	4				5	6	7	8	9		10	11	
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram dan nyaman	Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram dan nyaman	jumlah masyarakat yang terkoordinasi dalam pencegahan dini terhadap gangguan ketertiban keamanan					<b>program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	persentase potensi konflik yang terdeteksi di tangani( F= jumlah konflik tertangani dibagi jumlah konflik yang ada X 100 %	100%	100%	607.005.900		561.510.150		

## REKAPITULASI RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

						07	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Terlaksananya pendidikan dan latihan kader bela negara (F= jumlah kader bela negara yang berhasil mengikuti diklat dibagi jumlah kader yang mengikuti diklat x 100 %	100	150 org	80.250.000	150 org	79.621.500
						05	Fasilitasi komunitas intelijen Daerah (KOMINDA )	jumlah peserta rakor anggota kominda dan kegiatan PAM tertutup	25	45 org	74.820.500	45 org	66.520.500
						06	Fasilitasi Forum Komunitas Pimpinan Daerah ( FORKOPINDA )	jumlah peserta pertemuan FORKOPINDA	-	450 org	63.095.000	450 org	58.396.000
							penguatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing	persentase penanganan konflik	-	450 org	52.734.500	450 org	52.409.500
						01	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya fasilitasi koordinasi FKDM	74	1050 org	83.497.250	1050 org	81.419.750
							pengendali an keamanan lingkungan	Terfasilitasinyapengamanan kegiatan daerah pembinaan petugas keamanan	56	1050 org	416.355.900	1050 org	384.194.150



**REVISI RENSTRA 2016 - 2021**

	meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	persentase masyarakat yg faham terhadap potensi bencana				<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	<b>persentase penduduk yg mendapatkan sosialisasi tentang mitigasi bencana</b>	100		215.348.150		211.893.168	
									100%				
						Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100	150 org	69.430.000	150 org	66.865.000	
						Fasilitasi SAT - LAK dan kelurahan tangguh bencana	Jumlah koordinasi SAT- LAK PBP	100	70 org	74.589.900	70 org	91.578.625	
						Pelatihan SAR Tanggap Darurat Bencana tanggap darurat bencana	jumlah peserta pelatihan SAR tanggap darurat bencana pelatihan SAR tanggap darurat	100	50 org	59.352.000	50 org	53.449.543	
						<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>persentase kecukupan pelayanan perkantoran( F== jumlah realisasi dibagi yang direncanakan X 100 % )</b>		100%	393.070.515		386.428.915	
						Penyediaan jasa surat menyurat	Pembelian benda benda pos	100	2 jenis	1.913.000	-	-	
						Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air, dan listrik	pembayaran rekening listrik, telp,internet, air	100	4 jenis	62.400.000	4 jenis	27.051.387	
						Penyediaan ATK	Pemenuhan kebutuhan ATK	100	32 jenis	26.431.000	32 jenis	29.845.950	
						Penyediaan Barang	ketersediaan barang cetakan	100	17 jenis	87.562.500	17 jenis	86.422.500	

## REVENUE RENSTRA 2016 - 2021

						cetakan Penyediaan komponen instalasi listrik	pembelian alat listrik	100	6 jenis	15.174.000	6 jenis	10.629.000		
						penyediaan alat rumah tangga	ketersediaan alat alat RT	100	15 jenis	13.544.000	15 jenis	13.587.075		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang undangan	Tersediannya Bahan Bacaan	100	3 jenis	5.400.000	3 jenis	5.625.000		
						Penyediaan makan minum	Tersediannya makan minum tamu dan rapat	100	24 keg	26.844.000	24 keg	24.108.500		
						Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	tersediannya anggaran untuk koordinasi dan konsultasi	100	48 org	383.024.000		189.160.403		
						Pengadaan mebelair	pengadaan kebutuhan mebelair		-	-				
						pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan kantor	100	5 jenis	45.048.000	-	-		
						Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Tersediannya perlengkapan kantor	100		239.500.500		234.087.488		
						Pemelihara an rutin / berkala Gedung Kantor	Tersediannya pengecatan gedung kantor	100	2500 m2	47.750.000	2500 m2	87.825.000		
						Pemelihara an rutin / berkala kendaraan operasional	Perawatan alat transportasi	100	4 jenis	117.800.000	4 jenis	102.483.988		
						Pemelihara an Rutin /	Perawatan peralatan kantor	100	3 jenis	5.900.000	3 jenis	25.750.000		



## REVISI RENSTRA 2016-2021

						perencanaan Kegiatan dan anggaran	RKA, DPA, SKPD							
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusnya Lakip, LPPD, LKPJ, SPP, IKM dan SOP	100	12 jenis	6.211.500	12 jenis	4.848.000		

## REVISI RENSTRA 2016-2021

**TABEL 6.3**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH 2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										2018				
										Target	Rp.			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatkan Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Prosentase penanganan potensi kasus SARA	4	33	xx	08	<b>Program Pembauran dan Peningkatan wawasan kebangsaan</b>	persentase penduduk usia 14 s/d 49 tahun yang mengikuti wawasan kebangsaan	60%	70%		Bakesbang pol dan PBD		
							04	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama	jumlah peserta sosialisasi, rapat koordinasi FKUB	100	25 org			143.430.200
							01	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	jumlah peserta sosialisasi pembauran kebangsaan	100	150 org			69.254.300
								Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	jumlah peserta pendidikan dan latihan kader bela negara		150 org			37.289.800
02	Fasilitasi kelompok kerja pusat pendidikan wawasan kebangsaan	jumlah kelompok kerja pusat pendidikan wawasan kebangsaan di kota blitar	-	33 org	71.600.900									

REVISI RENSTRA 2016 - 2021

						(PPWK) dan sosialisasi wawasan kebangsaan							
										150 org	80.250.000		
					06	Seminar , Talkshow, Diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan ( F = Jumlah peserta sosialisasi yang hadir dibagi jumlah peserta sosialisasi ) jumlah peserta seminar wawasan kebangsaan	100	150 org		31.582.700		
					05	PentaS Seni dan Budaya, festival lomba ciptadalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah fasilitasi kegiatan korp musik kota blitar	100	10 upacara		103.496.900		
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman tentram dan nyaman	Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang aman , tentram dan nyaman	jumlah masyarakat yang terkoordinasi dalam pencegahan dini terhadap gangguan ketertiban keamanan				<b>Program Penanganan konflik dan pemberantasan penyakit masyarakat</b>	Persentase potensi konflik yang terdeteksi ditangani	70	100%				



## REVISI RENSTRA 2016-2021

						03	Penyuluhan, pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan Narkoba	Jumlah masyarakat yang memiliki kesadaran akan bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba	100	150 org	53.615.200		
Indeks demokrasi indonesia	meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Prosentase ormas / orpol yg mematuhi ketentuan perundang undangan	4	33	xx		<b>Program Pengembangan Budaya dan Penguatan Demokrasi</b>	<b>persentase kinerja baik bagi ormas terdaftar</b>					
							penyuluhan kepada masyarakat	jumlah peserta penyuluhan ormas	100	200 org	31.490.100		
							koordinasi forum forum diskusi politik	jumlah peserta forum diskusi politik politik	100	200 org	14.496.000		
							Fasilitasi Indeks demokrasi Indonesia	jumlah buku data indeks demokrasi indonesia di kota blitar		10 buku	94.419.200		
							Fasilitasi Pemberdayaan Ormas / LSM.Elemen Masyarakat	jumlah ormas yang mengikuti kegiatan	100	100 org	23.912.000		
							Fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan umum	jumlah anggota petugas pemantau dan tim desk yang terfasilitasi	150	325 org	394.259.200		
							Pemahaman dan peningkatan penggunaan hak pilih	jumlah peserta sosialisasi pemilih pemula dan masyarakat	450 org	900 org	54.448.000		

## REVISI RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

						Penguatan Biudaya Politik	jumlah peserta dialog interaktif	100	130 org	27.251.200		
	meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	persentase masyarakat yg faham terhadap potensi bencana				<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	<b>persentase penduduk yg mendapatkan sosialisasi tentang mitigasi bencana</b>	100				
						Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	jumlah peserta sosialisasi pencegahan dini penanggulangan bencana alam	100	250 org	141.186.000		
						Fasilitasi PUSDALOPS dan kelurahan tangguh bencana	jumlah koordinasi PUSDALOPS , kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana	100	1 keg 8 kel 2 sklh	203.470.800		
						Pelatihan SAR Tanggap Darurat Bencana	jumlah peserta pelatihan SAR Tanggap Darurat bencana	100	50 org	98.598.000		
						Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi dari ancaman korban bencana alam	jumlah jenis pengadaan peralatan evakuasi korban bencana alam		12 jenis	190.840.020		
						<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>persentase kecukupan pelayanan perkantoran( F== jumlah realisasi dibagi yang direncanakan X 100 % )</b>		100%	-		

## REVENUE RENSTRA 2016 - 2021

					Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah macam surat menyurat yang tersedia	100	2 jenis	2.100.000	
					Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air, dan listrik	jumlah rekening yang terbayarkan	100	3 rek	42.600.000	
					Penyediaan ATK	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	100	32 jenis	31.297.200	
					Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100	17 jenis	77.379.799	
					Penyediaan komponen instalasi listrik	jumlah komponen listrik yang tersedia	100	6 jenis	11.652.859	
					penyediaan alat rumah tangga	Jumlah peralatam rumah tangga yang tersedia	100	31 macam	15.215.455	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	100	3 jenis	7.200.000	
					Penyediaan makan minum	jumlah dos/kotak makan yang tersedia	100	24 keg	31.200.000	
					Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	100	48 org	178.323.000	
					Pengadaan mebelair	pengadaan kebutuhan mebelair		-	-	
					pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	100	9 macam	33.981.500	
					Pengadaan perlengkapan	jumlah perlengkapan kantor yang		8 macam	45.680.805	

## REVENUE RENSTRA 2016 - 2021

						Gedung Kantor	tersedia					
						Pengadaan Mebelair	jumlah mebelair yang terpenuhi					70.967.200
						Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	100	1 unit			33.797.500
						Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	100	4 unit			130.709.800
						Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	100	4 macam			8.556.600
						Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100	4 macam			14.040.000
						Pemeliharaan rutin / berkala Taman Kantor	jumlah taman kantor yang terpelihara	100	3macam			5.700.050
						Pemeliharaan rutin / berkala mebelair	jumlah mebelair yang terpelihara		2 macam			9.480.900
						<b>Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat partisipasi perangkat Daerah dalam agenda Kota( F = jumlah realisasi dibagi jumlah yang direncanakan di X 100 % )</b>	100	100%			
						Fasilitasi keberansertaan	jumlah even daerah dan hari besar	100	6 macam			50.000.000

## REVISI RENSTRA 2016 - 2021

						pada even daerah dan hari besar Nasional	nasional yang diikuti				
						Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD	jumlah publikasi program kegiatan perangkat daerah	100	7 publikasi	10.000.000	
						<b>program peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan (F = Jumlah realisasi dibagi jumlah yang direncanakan X 100 % )</b>		100%		
						Penyusunan perencanaan Kegiatan dan anggaran	jumlah dokumen yang tersusun , renstra, renja, IKU IKI RKA DPA DPPA		-	1.996.000	
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen yang tersusun Lakip, LPPD, LKPJ, SPP, IKM dan SOP	100	12 jenis	2.115.200	

## REVISI RENCANA RENSTRA 2016-2021

**TABEL 6.1.3**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH 2019 – 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2019		2020		2021			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Meningkatkan Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Prosentase kejadian SARA yang Tertangani	4	33	xx	08	<b>Program pengembangan nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan Bangsa</b>	<b>Persentase penduduk usia 14 s/d 49 tahun yang mengikuti wawasan kebangsaan</b>	80%	80%	726.742.900	90%	811.193.600	100%	879.358.909	Bakesbang pol dan PBD	
					01	Peningkatan persatuan kesatuan bangsa hak asasi manusia	Jumlah peserta desiminasi dan dialog kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan		350 org	285.694.500	200 orang	353.479.700	150 org	345.690.345			
							Jumlah fasilitasi forum kerukunan umat beragama		25 org		250 orang		200 org				

## REVISI RENSTRA 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jumlah jenis dokumen indeks kerukunan umat beragama		1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen			
					Jumlah peserta talk show kerukunan umat beragama					100 orang						
					Jumlah peserta doa bersama lintas agama					500 orang						
					Jumlah peserta sarasehan toleransi kerukunan umat beragama					150 orang						
					Jumlah peserta talk show pembauran kebangsaan					100 orang						
					Jumlah peserta sarasehan pemenuhan HAM					100 orang						

## REVISI RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											350 orang					
				02	Peningkatan pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan			150 org	441.048.300	150 orang	457.713.900	150 org	533.668.443			
								300 org		100 orang		150 org				
										150 orang						
										50 orang						
										50 orang						
										100 orang						
										2380 orang						

## REKAMEN RENCANA 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2019		2020		2021			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4.01	6	19		<b>Program Penangan an Konflik Dan Pemberan tasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Persentase potensi konflik yang terdeteksi dan tertangani</b>	100%	100%	511.262.873	100%	830.195.075	100%	618.628.076		
								<b>Persentase penanganan penyakit masyarakat</b>	100%	100%		100%		100%			
						01	Penguatan Kewaspadaan Daerah	Jumlah peserta rakor tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah		300 org	119.694.500	50 orang	174.843.900	50 org	144.830.345		
								Jumlah peserta rapat koordinasi FKDM kota		200 org		50 orang		450 org			
								Jumlah peserta peningkatan kapasitas analisis pemantauan kebijakan dan kondisi wilayah		350 org		60 orang		450 org			

## REKAMEN REKSTRAS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										2019		2020		2021				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							5. jumlah hibah kendaraan operasional yang tersedia ( hibah ke Kodim )		15 unit					15 unit				
						02	Pencegahan dan penanganan Konflik		3 posko	391.568.373	3 posko	655.351.175	3 posko	473.797.731				
							Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan miras dan narkoba		150 org		200 orang		150 org					
							Fasilitasi TIM SATLAK Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ( P4GN )		150 org		2 giat		150 org					

## REVISI RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2019		2020		2021			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										450 org		450 orang		450 org			
										75 org		60 orang		100 org			
										500 org		4.125 orang		500 org			
			4.01	6	18		<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana</b>	<b>Persentase tertanganinya kejadian bencana</b>	100%	100%	207.839.800	100%	515.958.300	100%	251.486.158		
						01	Peningkatan kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana	Jumlah Koordinasi PUSDALOPS PB Kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana		9 lap/9 kel/3 sklh	150.542.200	150 orang	317.999.000	150 org	182.156.062		

## RENMU RENSTRA 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2019		2020		2021			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah peserta pembekalan pencegahan dini penanggulangan bencana alam		50 org		300 orang		70 org				
							Jumlah peserta pelatihan SAR tanggap darurat bencana		50 org		250 orang		50 org				
						02	Penyediaan sarana dan prasarana logistik dan fasilitas rehab rekon kebencanaan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana kebencanaan	12 bh	57.297.600	19 jenis	197.959.300	4 unit	69.330.096			
							Jumlah rehab rekon kebencanaan yg dilaksanakan		5 giat		8 kegiatan		5 giat				
							Jumlah peserta rehab rekon kebencanaan		50 org		50 orang		50 org				

## REVISI RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2019		2020		2021			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Indeks demokrasi indonesia	meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Prosentase ormas / orpol yg mematuhi ketentuan perundang undangan	4.01	6	21		<b>Program pengembangan budaya politik dan penguatan demokrasi</b>	<b>Persentase penduduk pemilih yang menggunakan hak pilihnya</b>		80%	896.054.900	81%	1.474.094.000	82%	2.408.000.000		
								<b>persentase ormas/ orpol yang dibina sesuai aturan</b>		76%		78%		80%			
						01	Peningkatan Kesadaran Politik dan Kapasitas Politik	Jumlah peserta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu		200 org	156.429.600	2.110 orang	473.463.900	1050 org	189.279.816		
								Jumlah peserta sarasehan budaya politik		450 org		200 orang		1050 org			
								Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik				450 orang		1 keg			
								Jumlah peningkatan kapasitas partai politik				60 orang					
								Fasilitasi		28		1					

## REVISI RENSTRA 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									variabel		dokumen					
					02	Penyelenggaraan pendukungan Pemilu			2175 org	659.087.400	314 orang	818.788.100	60 org	797.495.754		
									4 jenis		9 sarpras		4 jenis			
					03	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan			250 org	77.537.900	190 orang	181.842.000	60 org	550.000.000		
											1 data base					

## REVISI RENSTRA 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2019		2020		2021			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah peserta jambore kepemudaan organisasi kemasyarakatan				160 orang						
			4.01	06	01		<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Persentase kecukupan pelayanan perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1.831.022.600</b>	<b>100%</b>	902.638.350	<b>100%</b>	2.215.537.346		
						01	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis ATK yang tersedia		32 jenis	158.688.100	32 jenis	143.614.800	32 jenis	192.012.601		
							Jumlah barang cetakan yang tersedia		17 cetakan			17 cetakan		17 jenis			
							Jumlah lembar penggandaan		40000 lbr			40.500 lbr		60000 lbr			
							Jumlah bacaan yang tersedia		3 macam			3 macam		3 jenis			

## REKONSTRUKSI RENSTRA 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2019		2020		2021			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia		875 dos		653 dos		900 dos				
							Jumlah benda pos yang tersedia				1 jenis						
						02	Rapat Rapat dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		48 rakor	245.000.000	48 rakor	301.112.100	35 rakor	296.450.000		
						03	Penyediaan jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan		10 org/ 12 kali	1.200.000	12 kali	2.450.000	10 org / 12 kali	1.452.000		
						04	Penyusunan perencanaan pengelolaan dan pelaporan sarana prasarana perkantoran	jumlah rekening yang terbayarkan		4 rek	1.406.134.509	3 rek	455.461.450	4 rek	1.701.422.756		

## REVISI RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					n											
					jumlah kendaraan dinas yang terpelihara					4 unit						
					jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya			15 unit		12 unit		15 unit				
					jumlah jenis komponen listrik yang tersedia			6 komponen		7 komponen		10 komp				
					Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia			15 macam		23 macam		16 macam				
					jumlah jenis mebelair yang terpelihara			5 jenis		1 jenis		5 jenis				
					Jumlah peralatan kantor yang					3 macam						

## REVISI RENSTRA 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					tersedia											
					jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang tersedia		5 jenis		2 macam		5 jenis					
					jumlah jenis mebelair yang tersedia		3 jenis		4 jenis		4 jenis					
					jumlah bangunan kantor yang terpelihara		2500 M2		2500 m2		2500 m2					
					Jumlah peralatan kantor yang terpelihara		7 macam		3 macam		7 macam					
					jumlah perlenkapan gedung kantor yang terpelihara		5 macam		7 macam		5 macam					
					jumlah bangunan kantor yang terehab		3 unit				3 unit					

## REKAPITULASI RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2019		2020		2021			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										15 unit		4 unit		15 unit			
												2 unit					
										7 bh		7 bh		7 bh			
										6 macam		6 macam		6 macam			
						05	Penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan perangkat daerah			10 dok	10.000.000	6 dok	10.000.000	10 dok	12.100.000		
						06	Penyusunan laporan keuangan			10 dok	10.000.000	5 dok	10.000.000	10 dok	12.100.000		

## REVISI RENSTRA 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2019		2020		2021			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4.01	06	02		<b>Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah</b>	<b>persentase partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota</b>		<b>100%</b>	<b>119.900.000</b>	<b>100%</b>	100.000.000	<b>100%</b>	145.079.000		
						01	Pengelolaan administrasi dan kelengkapan kepegawaian	jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti		6 even	79.900.000	3 even	60.000.000	6 even	96.679.000		
						02	Pengelolaan publikasi dan informasi perangkat daerah	jumlah publikasi program kegiatan perangkat daerah		7 publikasi	40.000.000	4 publikasi	40.000.000	7 publikasi	48.400.000		
			4	1	19		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan</b>		100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	6.050.000		

## RENMU RENSTRA 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										2019		2020		2021				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						19	01	Penyusunan dan pelaporan perencanaan pembangunan perangkat daerah	jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun		10 dok	5.000.000	11 dokumen	10.000.000	610 dok	6.050.000		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN**  
**KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH KOTA BLITAR**

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1 dan 7.2, sedangkan indikator kinerja utama diuraikan dalam table 7.1.3.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2016 - 2017**

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2016 )		TARGET	REALISASI
			2015	2016	2017	2017
1	Jumlah kasus SARA	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100%	100 %	100 %	100%
2	Indeks Demokrasi	Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang terdaftar	-	-	79 %	72,19%
		Persentase Konflik Sosial yang tertangani	-	-	100 %	100 %
		Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	25 %	23,8 %

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2018**

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET
			2016	2017	2018
1	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	Persentase Kasus SARA yang tertangani	100 %	100%	100%
2	Indeks Demokrasi	Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang terdaftar	70 %	79 %	79 %
		Persentase Konflik Sosial yang tertangani	100 %	100 %	100 %
		Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	14 %	25 %	35 %

**RENMU RENSTRA 2016-2021**

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2019 - 2021**

NO	Indikator RPJMD	Indikator Renstra	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Pada Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2021
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Persentase penanganan potensi Kasus SARA	Persentase kasus SARA yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Indeks Demokrasi	1. Persentase konflik sosial yang tertangani	79 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
		2. Persentase ormas/orpol yang dibina sesuai aturan		72%	76%	78%	80%	80%
		3. Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	25 %	35 %	45 %	60 %	80 %	80 %

**Tabel. 7. 4**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2017 -2021**

No.	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Prosentase kejadian SARA yang tertangani	Jumlah kejadianSARA yang tertangani/ jumlah kejadian SARA x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase konflik sosial yang tertangani	Jumlah Konflik sosial yang tertangani / jumlah konflik sosial x 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh bencana / jumlah kelurahan x 100%	25%	35%	45%	60%	80%	
4	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partai politik	Persentase ormas dan orpol yang etrdaftar	Jumlah Orkemas yang terdaftar / jumlah orkemas X 100 %	72%	74%	76%	78%	80%	

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 ( Lima ) Tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan , program dan kegiatan selama Tahun 2016 – 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Badan Keatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016- 2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Dan disahkan dengan keputusan kepala Badan Kesatuan bangsa politik dan penanggulangan bencana Kota Blitar .Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Badan kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Bakesbangpol dan PBD dalam melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan , dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat . sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparat dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreatifitas, dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan ( fleksibilitas ) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar maka dokumen rencana strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Blitar,

2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik  
Dan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Blitar



*REVIJE RENSTRA 2016-2021*